

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Budaya dan ideologi tidak diciptakan secara kebetulan. Dua hal itu terjadi dikarenakan ulah manusia dari waktu ke waktu. Nilai-nilai kebudayaan menjadi faktor inti yang mempengaruhi tindakan manusia baik secara individu maupun berkelompok¹. Di Indonesia, budaya patriarki sangat eksis dan bertahan kedalam sistem sosial, politik, ekonomi, dan diskriminatif kepada perempuan. Keadaan seperti itu membatasi partisipasi perempuan untuk terjun di ranah publik. Budaya patriarki merupakan pola pikir yang di mana laki-laki menjadi otoritas sentral utama dan mengakui bahwasanya laki-laki superior dibanding perempuan dalam berbagai aspek sosial. patriarki selalu terhubung dengan sifat dan kekuasaan yang tidak perlu dipermasalahkan lagi, patriarki dianggap normal dalam masyarakat tradisional. Diperkirakan bahwa karena Tuhan menciptakan pria dan wanita secara berbeda, ada perbedaan dalam kehidupan manusia yang terstruktur di sekitar perbedaan-perbedaan ini, dan pertimbangan agama sering digunakan untuk mendukung status pria²

Karena patriarki selalu dikaitkan dengan nilai-nilai dan karakter yang tidak dapat dicapai, masyarakat umum percaya bahwa hal itu tidak perlu dibahas dan tidak perlu mempermasalahkannya. Hal ini dapat dijelaskan dengan mengatakan bahwa Tuhan menyadari perbedaan antara pria dan wanita, penggunaan nilai-nilai agama tidak hanya untuk memperkuat ikatan keluarga saja, tetapi menjelaskan jenis dan perbedaan dalam perilaku manusia. Gender adalah konsep mengenali peran yang dimainkan pria dan wanita dalam waktu dan budaya tertentu yang dibangun secara umum, sedangkan seks adalah perbedaan biologis dan fisiologis antara pria

¹ Koentjaraningrat, 'Culture, Mentality and Development (Kebudayaan, Mentalitas Dan Pembangunan)' (Gramedia Jakarta, 2004), p. 47.

² W Suryaningsih, 'Peranan Organisasi WHDi Dalam Pemberdayaan Wanita Hindu Di Kampung Jati Datar Mataram, Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung Tengah' (Lampung, 2012), p. 18.

dan wanita yang dilihat secara anatomis dan reproduksi. Tuhan menciptakan seks, tetapi manusia menciptakan perbedaan gender antara pria atau wanita, sedangkan diskriminasi diciptakan oleh negara dan pria³.

PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) memiliki misi pada tahun 2030 mencakup 17 tujuan yang saling berkaitan untuk mencapai pembangunan berkelanjutan di dunia. Misi-misi ini meliputi berbagai aspek kehidupan seperti; pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan kesetaraan gender. Randazzo (2019) melakukan survei *Sustainable Development Goals* (SDGs) mengenai *Gender equality* di Indonesia, hasilnya Indonesia mendapati skor 57 yang mana skor tersebut tepat berada di atas rata-rata. Meskipun Di Indonesia banyak perempuan yang berani menunjukkan perannya sebagai pemimpin atau tokoh publik. Dengan skor tersebut, kesetaraan gender di Indonesia masih belum merata, faktor lain dari minimnya skor *gender equality* disebabkan oleh luasnya wilayah Indonesia hal itu mempengaruhi banyak dari daerah-daerah yang menganut budaya patriarki⁴.

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) juga menargetkan kesetaraan gender, khususnya gerakan global 50:50 pada tahun 2030. Indonesia memprediksi bahwa perempuan akan mampu mengisi semua sektor strategis yang saat ini hanya ditempati oleh laki-laki. Pentingnya keterwakilan perempuan dalam semua aspek politik dan pembangunan sebagai komponen pembangunan jangka panjang. Mengacu pada sifat perempuan yang mengutamakan estetika politik dalam perannya⁵.

Laki-laki melebihi jumlah perempuan pada aspek ketenagakerjaan, terhitung laki-laki memiliki angkatan kerja 89.429.628 orang sedangkan perempuan memiliki angkatan kerja 57.192.158 orang, data berdasarkan dari Badan Pusat Statistik tentang status Keadaan Angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2023. Pada data tersebut juga terhitung angkatan kerja berdasarkan jenis kelamin pada jenis kegiatan *house keeping* menunjukkan bahwa lebih banyak

³ Elfi Muawanah, 'Pendidikan Gender Dan Hak Asasi Manusia', *Yogyakarta: Teras*, 2009, 8 (p. 23).

⁴ Clarissa Nathania Octaviani and others, 'Gerakan Feminisme Melawan Budaya Patriarki Di Indonesia', *BroadComm*, 4.1 (2022), 23–24 (pp. 23–24) <<https://doi.org/10.53856/bcomm.v4i1.232>>.

⁵ Siti Musdah Mulia and Anik Farida, *Politik Dan Perempuan*, *Gramedia Pustaka Utama*, 2005, p. 43.

perempuan daripada laki-laki. terhitung 36.569.966 untuk perempuan dan 3.544.761 untuk laki-laki mengurus rumah. Data ini menunjukkan bahwasanya posisi perempuan untuk ditempatkan di jenis kegiatan *house keeping* lebih banyak dibanding laki laki, terhitung memiliki selisih 33.025.199 perempuan. Artinya, laki-laki masih memegang posisi yang lebih tinggi di ranah publik dan sejumlah besar perempuan masih banyak yang ditugaskan untuk peran domestik⁶.

Tabel 1.1

Ketenagakerjaan di Indonesia Tahun 2023

Jumlah Tenaga Kerja Tahun 2023		Jumlah Tenaga Kerja <i>House keeping</i>	
Laki-laki	Perempuan	Laki-laki	Perempuan
89.429.628	57.192.158	3.544.761	36.569.966

(Sumber : Badan Pusat Statistika Tahun 2023)

Beberapa ahli studi feminisme mengemukakan pendapatnya bahwasanya salah satu upaya yang paling konkrit untuk meningkatkan posisi *inferior* wanita adalah dengan membentuk suatu organisasi yang dapat memberdayakan perempuan dengan seharusnya⁷. Seperti Pemberdayaan perempuan yang terdapat pada organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) yang sangat memprioritaskan pemberdayaan perempuan Hindu dalam meningkatkan kualitas sumber daya perempuan yang beragam, termasuk pendidikan dan keterampilan mereka. WHDI adalah organisasi komunitas sosial yang menyediakan *platform* bagi perempuan Hindu untuk diberdayakan. Organisasi ini merupakan organisasi independen yang tidak mencari perlindungan dalam payung sosial-politik dikarenakan tujuan utama organisasi ini adalah untuk meningkatkan kesadaran perempuan akan peran mereka di tempat kerja dengan mendorong pengembangan kesejahteraan material dan spiritual, serta ketahanan mental dan fisik, dalam peran mereka sebagai warga

⁶ BPS, 'Keadaan Kerja Angkatan Kerja Di Indonesia Tahun 2023', *Badan Pusat Statistik*, August 2023, 2023, 3–7.

⁷ Pinky Saptandari, 'Lima Tingkat Pemberdayaan Perempuan', 1999, 5 (p. 5).

negara Hindu dan warga negara Indonesia. Organisasi ini membantu anggotanya bertukar ide dan pengetahuan untuk saling memberdayakan dan memperkuat peran mereka sebagai ibu dan istri di rumah.

Pada Konferensi Nasional Ketiga Dharma Hindu Perempuan Indonesia pada tahun 2011, Pihak WHDI mengumumkan dasar bagi prinsip, tujuan, visi, dan misi organisasi WHDI. Program kerja WHDI ini sangat mengutamakan pengembangan kemampuan dan pengetahuan perempuan Hindu dengan harapan untuk mengembangkan kesejahteraannya baik dari segi jasmani maupun rohani. Terdapat kegiatan unggulan yang dimiliki oleh WHDI yaitu Menjalani hubungan dan kerjasama dengan elemen dan organisasi Hindu Parisadha dan Ormas Perempuan, Masyarakat lainnya untuk menjalin kebersamaan dalam kehidupan berorganisasi. Pada kegiatan ini pihak WHDI mengadakan pertemuan dengan pihak Hindu Parisadha dan Organisasi Perempuan untuk berdiskusi mengenai isu-isu yang terjadi dan kegiatan ini juga untuk menjalin kebersamaan satu sama lain.

Dalam agama Hindu terdapat sloka yang membahas mengenai kesetaraan yaitu;

"Yatra naryastu ramante tatra dewatah, yatrastu na puhyante sarwastalah kriyah"

Artinya:

"Dimana wanita dihormati, disana para dewa-dewa merasa senang, tetapi dimana mereka tidak dihormati, tidak ada upacara suci apapun yang akan berkah" (*Manawa Dharmasastra sloka 56*)⁸

Dari potongan ayat di atas membahas bahwasanya perempuan dan laki-laki adalah makhluk yang memiliki kedudukan dan status yang sama. Kedudukan yang sama untuk saling menghormati dan dihormati sesuai dengan perannya sehingga tercipta harmonisasi. Pada ayat di atas tersebut dijelaskan bahwasanya perempuan adalah sebuah cahaya yang dapat menyinari apa yang ada di dekatnya, teks suci ini membahas mengenai keutamaan dan pentingnya sosok perempuan dalam keluarga. Peran perempuan dalam agama Hindu merupakan sosok yang sangat dimuliakan.

⁸ Gede Pudja and Tjokorda Rai Sudharta, 'Manawa Dharma Śāstra, Compendium Hukum Hindu', Pelita Nursatama Lestari. Jakarta, 2002, 54 (p. 57).

Hal ini dikarenakan perempuan memiliki peran sebagai penerus generasi selanjutnya yang dapat menebus dosa para leluhur terdahulu. Kemuliaan perempuan ini membuat perempuan Hindu sangat dihormati di dalam kitab-kitab suci Hindu. Namun seringkali perempuan Hindu masih saja mendapatkan perlakuan yang kurang baik dari pria, karena pria lebih mendominasi di berbagai bidang termasuk di dalam keluarga Hindu.

Jadi berdasarkan permasalahan-permasalahan yang telah dipaparkan di atas, peneliti ingin melakukan penelitian mengenai bagaimana WHDI Menyosialisasikan kesetaraan gender Di Provinsi Jawa Barat dengan melakukan penelitian kepada jajaran pengurus organisasi WHDI dan keadaan lapangannya. Dengan demikian peneliti berfokus pada penelitian yang peneliti beri judul **"Peranan Organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia Dalam Menyosialisasikan Kesetaraan Gender Di Provinsi Jawa Barat)"**.

B. RUMUSAN MASALAH

Adapun rumusan masalah yang peneliti angkat pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemahaman kesetaraan gender di pengurus kalangan WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat?
2. Bagaimana upaya organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat dalam menyosialisasikan kesetaraan gender kepada anggota WHDI Di Provinsi Jawa Barat?
3. Bagaimana kontribusi organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) dalam Menyosialisasikan kesetaraan gender kepada masyarakat, pemerintah dan organisasi wanita lainnya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan dari penelitian ini merujuk dari rumusan masalah dan latar belakang yang sudah dijabarkan diatas, berikut adalah beberapa tujuan dalam penelitian yang dilakukan oleh peneliti;

1. Untuk mengetahui pemahaman kesetaraan Gender di kalangan pengurus WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat dalam Menyosialisasikan kesetaraan gender kepada anggota WHDI di Provinsi Jawa Barat?
3. Untuk mengetahui kontribusi organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat dalam Menyosialisasikan kesetaraan gender kepada masyarakat, pemerintah dan organisasi wanita lainnya?

D. MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan dari apa yang sudah tertera di latar belakang dan tujuan penelitian diatas, berikut peneliti akan paparkan mengenai manfaat-manfaat penelitian ini:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai mahasiswa yang mengampu pendidikan di bidang akademik khususnya di jurusan Studi Agama-Agama, setelah adanya penelitian ini dapat memberikan wawasan serta ilmu pengetahuan mengenai kesetaraan gender dalam organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini diharapkan menyediakan pemahaman mendalam tentang konsep kesetaraan gender WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Provinsi Jawa Barat, termasuk faktor-faktor sosial dan budaya yang mempengaruhi ketidaksetaraan gender.

2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis penelitian ini diharapkan masyarakat dapat membuka mata terutama bagi perempuan di Indonesia bahwasanya perempuan dapat ikut andil pada aspek-aspek yang didominasi oleh laki-laki. Perempuan di Indonesia juga dapat berkontribusi pada berbagai sektor yang diisi oleh laki-laki. Di Zaman sekarang ini budaya patriarki dan kapitalisme oleh laki-laki sangat marak terjadi di Indonesia terutama di daerah terpencil dan alasannya didominasi oleh latar belakang agama. Oleh karena itu, perempuan harus diberi ruang untuk dapat

berpartisipasi dalam organisasi dan gerakan sosial untuk mendorong pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek.

E. PENELITIAN TERDAHULU

Untuk mendorong adanya penelitian ini, peneliti membutuhkan beberapa sumber rujukan baik itu skripsi, jurnal maupun buku. Penelitian mengenai **Peranan WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Dalam Menyosialisasikan Kesetaraan Gender di Provinsi Jawa Barat** merupakan penelitian perdana yang dilakukan di Jawa barat. Namun sudah banyak penelitian membahas mengenai WHDI dan kesetaraan gender. Adapun literatur-literatur yang peneliti angkat menjadi sumber rujukan penelitian ini yaitu:

Pertama, skripsi yang berjudul *Peranan Organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Dalam Pemberdayaan Wanita Hindu Di Kampung Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung* yang ditulis oleh Wayan Suryaningsih dari jurusan Sosiologi Islam fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung tahun 2016. Dalam skripsi ini menjelaskan dalam skripsinya bahwasanya program kegiatan organisasi WHDI dianggap telah melakukan program kerja yang baik dalam memberdayakan perempuan Hindu di Kampung Jati Datar Mataram, terdapat beberapa bidang-bidang yang sudah merealisasikan program kerjanya pada daerah ini yaitu; bidang agama, bidang kebudayaan dan bidang organisasi. Walaupun tidak semua bidang, namun organisasi WHDI ini dianggap berhasil menjalankannya oleh masyarakat sekitar⁹

Kedua, artikel karya G Merthawan yang berjudul *"Peranan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Hindu Untuk Membentuk Karakter Anak Di Kota Palu"* dalam jurnal *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama dan Kebudayaan Hindu* Volume 7 Nomor 1 Tahun 2015. Pada artikel ini menjelaskan bahwasanya pelaksanaan kegiatan-kegiatan

⁹ Suryaningsih, p. 4.

yang dapat menumbuhkan pendidikan agama Hindu, Adapun kegiatan yang diselenggarakan oleh WHDI Kota Palu pada aspek keagamaan yaitu; kegiatan Dharmagita, Dharma Tula, Dharma Wacana, Dharma Santi dan yang terakhir adalah kegiatan lomba-lomba keagamaan¹⁰.

Ketiga, artikel karya I Gede Titah Pratyaksa yang berjudul "*Peranan Perempuan Hindu Milenial Sebagai Opinion Leader Kesetaraan Gender Di Era 4.0*" dalam jurnal *Communicare* Volume 1 Nomor 1 Tahun 2020. Artikel ini menjelaskan bahwa dalam agama Hindu, bahwasanya pria dan wanita mempunyai kedudukan yang setara. Dengan demikian, dikatakan salah jika mengatakan bahwa wanita Hindu kurang berharga dibanding pria. Hasil daripada jurnal ini ialah tidak akan ada lagi ketidakadilan atau diskriminasi yang memungkinkan perempuan Hindu untuk maju dan mendapatkan kepercayaan diri sejalan dengan nilai-nilai Hindu universal. Wanita Hindu di 4.0 mereka sekarang mengalami peningkatan tajam dalam jumlah¹¹



¹⁰ G Merthawan, 'Peranan Wanita Hindu Dharma Indonesia (Whdi) Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Hindu Untuk Membentuk Karakter Anak Di Kota Palu', *Widya Genitri: Jurnal Ilmiah Pendidikan, Agama Dan Kebudayaan Hindu*, 6.2 (2015), 53 (p. 4).

¹¹ I G T Pratyaksa, 'Peranan Perempuan Hindu Milenial Sebagai Opinion Leader Kesetaraan Gender Di Era 4.0, [The Role of Millennial Hindu Women as Opinion Leaders for Gender Equality in Era 4.0]', *Communicare*, 1.1 (2020), 73 (p. 4).

Tabel 1.2
Penelitian Relevan

NO	Penelitian Relevan	Persamaan	Perbedaan
1.	Wayan Suryaningsih, mahasiswi Universitas Lampung, Judul Skripsi: <i>Peranan Organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia) Dalam Pemberdayaan Wanita Hindu Di Kampung Jati Datar Mataram Kecamatan Bandar Mataram Kabupaten Lampung.</i>	Membahas mengenai peran organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia)	Fokus penelitian dalam skripsi Wayan Suryaningsih adalah pemberdayaan wanita Hindu, sedangkan fokus dalam penelitian saya adalah sosialisasi kesetaraan gender
2.	G Merthawan, mahasiswa STAH Dharma Sentana Sulawesi Tengah, judul artikel: <i>"Peranan Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) Dalam Menanamkan Pendidikan Agama Hindu Untuk Membentuk Karakter Anak Di Kota Palu"</i> .	Membahas mengenai peran organisasi WHDI (Wanita Hindu Dharma Indonesia)	Fokus penelitian jurnal G Merthawan adalah menanamkan pendidikan agama Hindu untuk membentuk karakter anak, sedangkan fokus dalam penelitian saya adalah sosialisasi kesetaraan gender
3.	I Gede Titah Pratyaksa, mahasiswa STAH Mpu Kuturan Singaraja, judul artikel: <i>"Peranan Perempuan Hindu Milenial Sebagai Opinion Leader Kesetaraan Gender Di Era 4.0"</i> .	Fokus penelitian membahas mengenai kesetaraan gender	Subjek penelitian I Gede Titah dalam artikelnya adalah perempuan Hindu, sedangkan subjek penelitian saya adalah organisasi WHDI

F. KERANGKA PEMIKIRAN

Dalam merumuskan penelitian ini, peneliti ingin menganalisa penelitian ini dengan pendekatan sosiologi. Peneliti tertarik untuk membawakan teori AGIL oleh Talcott Parsons mengenai sistem sosial. Masyarakat yang bersatu dengan dasar kesepakatan dari para anggota yang memiliki paham-paham kemasyarakatan sehingga mampu mengatasi perbedaan yang ada pada lingkungannya, hal ini dapat dilihat sebagai suatu sistem yang secara fungsi bersatu untuk menciptakan suatu keseimbangan. Hal yang demikian dapat disimpulkan bahwasanya masyarakat adalah kelompok yang terdiri dari sistem-sistem sosial yang saling berhubungan satu sama lain dan saling bergantung satu sama lain¹². Teori AGIL atau yang biasa dikenal sebagai teori struktural fungsional merupakan karya Talcott Parsons dan Robert Merton beserta pengikutnya yang telah menguasai kajian sosiologi di Barat. Talcott mengembangkan teori tentang masyarakat ini dibarengi dengan konsep kedudukan, peran, norma, kepentingan dan nilai¹³.

Teori AGIL terdiri dari *Adaptation* (Adaptasi), *Goal-Attainment* (Pencapaian Tujuan), *Integration* (Integrasi), dan *Latency* (Latensi) dalam penjelasannya membahas mengenai sistem sosial. Menurut Talcott Parsons (2008), Sistem sosial adalah;

*"Sistem sosial terdiri dari keragaman aktor individual yang berinteraksi satu sama lain dalam situasi sosial yang setidaknya berada dalam lingkungan atau ruang fisik, dimana aktor tersebut memiliki motivasi untuk cenderung mengoptimalkan gratifikasi, dan relasinya terhadap situasi dan aktor lain berlangsung dalam sebuah sistem yang melibatkan simbol-simbol yang secara kultural terstruktur"*¹⁴.

Pada definisi sistem sosial menurut Talcott Parsons dapat dikatakan cukup rumit untuk untuk memahaminya. Akan tetapi, frase "Berinteraksi satu sama lain untuk situasi sosial" merupakan inti daripada definisi diatas. Pada definisi yang lain,

¹² Richard Grathoff, 'Kesesuaian Antara Alfred Schutz Dan Talcott Parsons: Teori Aksi Sosial', Jakarta: Kencana, 2000, p. 24.

¹³ Haryanto Sindung, 'Spektrum Teori Sosial Dari Klasik Hingga Modern', Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2016.

¹⁴ Talcott Parsons, 'The School Class as a Social System', *Schools and Society: A Sociological Approach to Education*, 2008, 80-85.

sistem sosial merupakan suatu unsur yang saling berkaitan satu sama lain dan pada hubungan tersebut saling memberi pengaruh satu sama lain dalam kesatuan sosial. Pada suatu sistem sosial, dibutuhkan dua orang atau lebih untuk menciptakan suatu proses interaksi satu sama lain dan mencapai suatu tujuan dari proses interaksi tersebut.

Definisi sistem sosial yang terakhir adalah suatu sistem yang didalamnya berisikan elemen-elemen sosial. Elemen sosial itu terdiri dari aktivitas-aktivitas sosial yang dilakukan oleh individu-individu yang saling berinteraksi satu sama lain. Dalam suatu sistem sosial individu-individu yang saling berinteraksi tersebut menciptakan suatu hubungan-hubungan sosial. Sistem sosial dapat diartikan sebagai suatu kumpulan daripada sistem-sistem sosial yang saling berkaitan, berhubungan dan saling mempengaruhi satu sama lain dalam kesatuan. Aktivitas tersebut menciptakan suatu kebudayaan yang berpola dari masyarakat itu sendiri¹⁵.

Adapun inti pemikiran Talcott Parsons dikemukakan dalam empat sistem karyanya yaitu Teori AGIL yang didalamnya berisikan pandangan mengenai sistem tindakan yang menanggapi fungsi adaptasi (*Adaptation*), Sistem kepribadian yang menanggapi pencapaian tujuan (*Goal-Attainment*), Sistem sosial yang menanggapi fungsi integrasi (*Integration*), Sistem kebudayaan yang menanggapi fungsi pemeliharaan (*Latency*). Berikut penjelasan mengenai Teori AGIL;

- a) *Adaptation* (Adaptasi): Sistem harus mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhannya.
- b) *Goal-Attainment* (Pencapaian Tujuan): Sistem harus mendefinisikan dan mencapai tujuan utamanya, yang memungkinkan sistem untuk tetap langgeng dan berfungsi dengan baik.
- c) *Integration* (Integrasi): Sistem harus mengintegrasikan bagian-bagiannya menjadi satu kesatuan yang berfungsi dengan baik, melalui proses sosialisasi dan internalisasi nilai-nilai dan norma yang diproduksi oleh sistem.

¹⁵ Irving M Zeitlin, 'Memahami Kembali Sosiologi: Kritik Terhadap Teori Sosiologi Kontemporer, Terjemahan Anshori Dan Juhanda, Yogyakarta' (Gadjah Mada University Press. Profesi: Ibu Rumah Tangga Nama: Yusliani Noor Usia, 1995).

d) *Latency* (Latensi): Sistem harus memelihara pola-pola yang telah terbentuk dan mempertahankan keberlangsungan sistem dengan cara menginternalisasi nilai-nilai dan norma yang diproduksi oleh sistem.

Teori AGIL Parsons digunakan untuk memahami berbagai sistem sosial, termasuk masyarakat, organisasi, dan budaya. Dengan menggunakan teori ini, Parsons berusaha untuk menjelaskan bagaimana sistem sosial berfungsi dan bagaimana perubahan sosial terjadi, serta bagaimana sistem sosial dapat beradaptasi dengan perubahan lingkungan dan kebutuhan¹⁶.

Adanya organisasi WHDI ini merupakan hasil daripada perubahan sosial yang terjadi pada masyarakat Hindu terutama bagi wanita-wanita Hindu. Organisasi WHDI ini dibentuk untuk memberdayakan perempuan Hindu pada sektor sosial, kemasyarakatan dan keagamaan untuk menampung suara, aspirasi dan kreativitas wanita-wanita Hindu.

Pada zaman ini dunia pekerjaan didominasi oleh laki-laki. Maka dari itu, dalam konteks kesetaraan gender, perubahan sosial dapat mencakup evolusi dalam pemahaman dan penerimaan terhadap peran gender yang lebih setara terutama bagi wanita. Hal ini dapat mencakup pergeseran dalam tugas-tugas rumah tangga, kebijakan pekerjaan yang lebih setara, dan perubahan nilai-nilai masyarakat terkait peran gender. Sementara Parsons memandang perubahan sebagai suatu kebutuhan untuk menjaga keseimbangan sistem sosial, dalam konteks kesetaraan gender, perubahan ini tidak selalu diterima dengan mudah. Terdapat resistensi terhadap perubahan dari mereka yang mempertahankan norma dan nilai-nilai tradisional terkait gender¹⁷.

Teori AGIL yang dikembangkan oleh Talcott Parsons merupakan kerangka konseptual untuk memahami bagaimana sistem sosial mempertahankan stabilitas dan mencapai tujuan mereka. AGIL merupakan singkatan dari *Adaptation, Goal attainment, Integration, dan Latency*. Menerapkan teori ini dalam konteks

¹⁶ Ayu Nimastuti, 'Analisis Teori AGIL Dalam Pelaksanaan Kurikulum 2013 Di SD Negeri 10 Pangkalpinang' (Universitas Bangka Belitung, 2016).

¹⁷ Riana Ningtyas, Dhia, 'Peran Bantuan Hukum Struktural Dalam Transformasi Sosial: Sebuah Upaya Mewujudkan Kesetaraan Gender Dan Perubahan Struktur Dalam Masyarakat', *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 17.3 (2023), 331.

Organisasi Wanita Hindu Dharma Indonesia (WHDI) dapat membantu memahami bagaimana organisasi ini menyosialisasikan kesetaraan gender dalam masyarakat.

Pada poin *Adaptation*, Organisasi WHDI mampu beradaptasi dengan lingkungan sosial, politik, dan budaya yang terus berubah di Indonesia. Ini melibatkan pemahaman mendalam tentang tantangan dan peluang yang ada terkait dengan kesetaraan gender dalam konteks budaya Hindu dan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. WHDI dapat menyesuaikan program dan kebijakannya untuk tetap relevan dan efektif dalam memperjuangkan kesetaraan gender. Misalnya, WHDI dapat menyelenggarakan pelatihan dan lokakarya yang disesuaikan dengan kebutuhan perempuan di berbagai daerah, memastikan bahwa pesan kesetaraan gender diterima dan dipahami dengan baik di berbagai komunitas.

Pada poin *Goal Attainment*, WHDI memiliki tujuan utama untuk mempromosikan dan mencapai kesetaraan gender di masyarakat Hindu dan di Indonesia secara umum. Untuk mencapai tujuan ini, WHDI perlu menetapkan tujuan yang jelas dan strategis, serta mengembangkan rencana aksi yang efektif. Ini termasuk kampanye kesadaran, pendidikan tentang hak-hak perempuan, dan pemberdayaan perempuan melalui berbagai program dan kegiatan. WHDI dapat memastikan bahwa semua anggotanya memahami dan berkomitmen pada tujuan-tujuan ini, dan bahwa mereka bekerja bersama-sama untuk mencapainya.

Pada poin *Integration*, Untuk mencapai kesetaraan gender, WHDI perlu adanya kemampuan untuk mengintegrasikan berbagai elemen dalam masyarakat, termasuk laki-laki dan perempuan, serta berbagai kelompok umur dan latar belakang sosial-ekonomi. Integrasi ini penting untuk menciptakan koalisi yang kuat dan dukungan luas terhadap isu kesetaraan gender. WHDI perlu membangun kerjasama dengan organisasi lain, pemerintah, dan komunitas lokal untuk menciptakan sinergi dalam perjuangan kesetaraan gender. WHDI juga perlu memastikan bahwa nilai-nilai kesetaraan gender diinternalisasi dalam semua lapisan organisasi dan bahwa setiap anggota merasa terlibat dan didukung.

Dan yang terakhir pada poin *Latency*, Untuk mempertahankan dan memperkuat nilai-nilai kesetaraan gender dalam jangka panjang, WHDI perlu berfokus pada pemeliharaan pola sosial dan budaya yang mendukung tujuan ini. Ini

termasuk pendidikan berkelanjutan, baik formal maupun informal, yang menanamkan nilai-nilai kesetaraan gender sejak usia dini. WHDI perlu untuk melibatkan diri dalam upaya advokasi untuk perubahan kebijakan dan undang-undang yang mendukung kesetaraan gender, serta memastikan bahwa budaya organisasi dan masyarakat luas mendukung perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Dengan menerapkan kerangka AGIL, WHDI dapat lebih efektif dalam menyosialisasikan kesetaraan gender, memastikan bahwa adaptasi terhadap lingkungan, pencapaian tujuan, integrasi berbagai elemen masyarakat, dan pemeliharaan pola sosial yang mendukung kesetaraan gender semuanya dikelola dengan baik. Ini akan membantu WHDI mencapai tujuannya dalam memperjuangkan hak-hak perempuan dan menciptakan masyarakat yang lebih adil dan setara.



Gambar 1.1
Kerangka Konseptual

